

TESIS
MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN
KEMANDIRIAN PARTAI



Oleh:
M. REZA SAPUTRA
2310622038

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA
2025

TESIS
MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN
KEMANDIRIAN PARTAI

DESIGNING INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR POLITICAL
PARTIES IN INDONESIA: DEMOCRATIC ANALYSIS AND
PARTY AUTONOMY



Oleh:

M. REZA SAPUTRA

2310622038

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
JAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL

**MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN
KEMANDIRIAN PARTAI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Hukum Program Magister*

Disusun dan diajukan oleh:

M. REZA SAPUTRA

2310622038

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN
KEMANDIRIAN PARTAI**

Disusun dan diajukan oleh:

M. REZA SAPUTRA

2310622038

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 22-12-2025

Menyetujui:

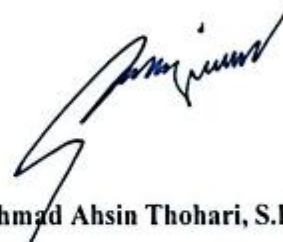
Pembimbing 1



Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

NIP. 196005021986031003

Pembimbing 2



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.

NIP. 197308042006041001



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN
KEMANDIRIAN PARTAI**

Disusun dan diajukan oleh:
M. REZA SAPUTRA
NIM. 2310622038

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 22 Desember 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1


Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
NIP. 196005021986031003

**Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister**


Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Pembimbing 2


Dr. Ahmad Ahsin Thohari, SH., M.H.
NIP. 197308042006041001

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta 09 Maret 2026
Tanggal Ujian : Jakarta 22 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Reza Saputra
NIM : 2310622038
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN KEMANDIRIAN PARTAI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



M. Reza Saputra
NIM: 2310622038

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Saputra
NIM : 2310622038
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN KEMANDIRIAN PARTAI”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



M. Reza Saputra
NIM.2310622038

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta Wakil Dekan.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. Koordinator Porgram Studi Hukum Program Magister, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyerpunaan penyusunan tesis ini.
5. Bapak Lio Tito dan Ibu tercinta Alm. Siti Kiptiah, selaku orang tua dan Kakak dan Adik yang telah tulus, Ikhlas memberikan segala cinta, kasih, dan sayangnya yang telah tidak hentihentinya memberikan doa yang tiada terbandingkan demi kebahagiaan dan keberhasilan penyusun.
6. Keluarga Besar Setia Rozi yang selalu mendukung baik itu secara materi, emosional dan serta kegelisahannya atas halangan yang menghambat keraguannya kepada penulis dengan keadaan ekonomi

yang tidak memungkinkan untuk penulis sampai pada akhir penyelesaian Studi Magister.

7. Nabila Hilyatunis, S.Hum. selaku calon isteri tercinta yang selalu menemani pendampingan penulisan tesis ini dengan penuh kasih sayang, memberikan support baik suka maupun duka.
8. Keluarga Besar Legenda Shanin Muh. Sodik, S.Ag., Taufiq Musa, S.Hum., Fitrah Khairunnas, S.Ag., Roby Awaluddin, S.Sos., Fajar, S.Pd., Anang Ma'ruf, S.H., yang selalu mendoakan dan mengingatkan untuk menyelesaikan studi.
9. Keluarga Besar Sultot, Adji Vikiantoro, S.Sos., Ahmad Saogi, S.H., Fahriza Hafiz, S.H., Imadduddin Zicky, S.H., Khoirul Habibi, S.Ag., Aldi Maulana, S.Ag., Ulul Albab, S.H., Muchsin Abdurrahman, S.Pd., M.Pd., Nailul Izzata Ghufro, S.Ag. Muhammad Febri Munsyid, S.Pd., Adibia Pradana, S.Pd., Jefri Maulana, S.Ag., Robbi Wildanul Ula, S.H., Bang Isa, Bang Dudung, Bang Fawwas, dll yang selalu mensupport demi menyelesaikan studi ini.
10. Keluarga Besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Muhajirin Cendana Residence yang memberikan support untuk menyelesaikan studi.
11. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 12 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



M. Reza Saputra
NIM.2310622038

ABSTRAK

MERANCANG DESAIN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: ANALISIS DEMOKRATIS DAN KEMANDIRIAN PARTAI

M. Reza Saputra (2310622038), Pembimbing 1 (Taufiqurrohman Syahuri),
Pembimbing 2 (Ahmad Ahsin Thohari)

Penelitian ini mengkaji desain kelembagaan partai politik Indonesia pasca-Reformasi 1998, dengan fokus pada bagaimana status badan hukum wajib menurut UU No. 2 Tahun 2011 menciptakan paradoks antara pengawasan negara dan otonomi partai. Studi mengidentifikasi tiga masalah utama: intervensi pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam sengketa internal partai, kecenderungan oligarkis yang menggerogoti partisipasi demokratis, dan erosi kemandirian partai dari manipulasi eksekutif. Menggunakan metodologi penelitian hukum kualitatif doktrinal, studi menganalisis peraturan perundangan kunci (UU No. 2 Tahun 2011), putusan Mahkamah Agung, studi kasus konflik internal partai (PKB, Golkar, Partai Demokrat), dan praktik perbandingan internasional dari Jerman, Swedia, dan Inggris. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan Kemenkumham mengesahkan perubahan kepengurusan partai berfungsi sebagai mekanisme kontrol politik daripada administrasi netral, melanggar prinsip kepastian hukum dan ketidakberpihakan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian merumuskan model kelembagaan lima pilar: (1) reposisi rezim badan hukum sebagai mekanisme formal-netral terpisah dari persyaratan peserta pemilu; (2) menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pintu masuk tunggal netral untuk pendaftaran pemilu; (3) mengalihkan penyelesaian sengketa kepada pengadilan independen, bukan badan eksekutif; (4) merancang mekanisme demokrasi internal dengan batasan masa jabatan dan penjaga anti-oligarki; serta (5) memperkuat transparansi keuangan dan pendidikan politik internal. Kerangka ini bertujuan mengembalikan kemandirian partai sekaligus mempertahankan akuntabilitas demokratis, sehingga memperkuat sistem kepartaian Indonesia sebagai pilar demokrasi sejati daripada instrumen kontrol negara.

Kata Kunci: Institusionalisasi Partai, Kemandirian Partai, Tata Kelola Demokratis, Status Badan Hukum, Intervensi Pemerintah.

ABSTRACT

DESIGNING INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR POLITICAL PARTIES IN INDONESIA: DEMOCRATIC ANALYSIS AND PARTY AUTONOMY

M. Reza Saputra (2310622038), Advisor 1 (Taufiqurrohman Syahuri),

Advisor 2 (Ahmad Ahsin Thohari)

This study examines the institutional design of political parties in Indonesia following the 1998 Reformation, focusing on how mandatory legal entity status under Law No. 2/2011 creates paradoxes between state oversight and party autonomy. The research identifies three major problems: governmental intervention through the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in internal party disputes, oligarchic tendencies that undermine democratic participation, and the erosion of party independence from executive manipulation. Using qualitative doctrinal legal methodology, the study analyzes key legislation (Law No. 2 of 2011), Supreme Court decisions, case studies of intra-party conflicts (PKB, Golkar, Democratic Party), and international comparative practices from Germany, Sweden, and England. The findings reveal that Kemenkumham's authority to approve party leadership changes operates as a mechanism of political control rather than neutral administration, violating principles of legal certainty and impartiality enshrined in the Law on State Administration. Consequently, the research proposes a five-pillar institutional model: (1) repositioning the legal entity regime as a neutral-formal mechanism independent of electoral participation requirements; (2) establishing the General Elections Commission (KPU) as the single neutral entry point for electoral registration; (3) transferring dispute resolution to independent courts rather than executive agencies; (4) designing intra-party democracy mechanisms with leadership term limits and anti-oligarchy safeguards; and (5) strengthening financial transparency and internal political education. This framework aims to restore party autonomy while maintaining democratic accountability, thereby strengthening Indonesia's party system as a genuine pillar of democracy rather than an instrument of state control.

Keywords: Party Institutionalization, Party Autonomy, Democratic Governance, Legal Entity Status, Governmental Intervention.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Kerangka Teoritis	20
1. <i>Grand Theory</i>	20
a. Teori Demokrasi	20
2. <i>Middle Range Theory</i>	26
a. Teori <i>Institutional Party</i>	26
b. Teori Kenyataan Yuridis (<i>Juridische Realiteitsleer</i>)	30
c. Teori Hukum Administrasi Negara	33
3. <i>Applied Theory</i>	41
a. Independensi Partai Politik.....	41

b. Teori Independensi	46
c. Teori <i>State-Party Relations</i>	52
B. Kerangka Berpikir	57
C. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Jenis dan Sumber Data	62
C. Teknik Pengumpulan	63
D. Analisis Data atau Bahan Hukum	64
BAB IV PEMBAHASAN	66
A. Desain Kelembagaan Partai Politik yang Berlaku di Indonesia Saat Ini dan Problem Utama Demokrasi Internal serta Kemandirian Partai	66
1. Desain Kelembagaan Partai Politik Indonesia Pasca-Reformasi: Antara Formalitas dan Substansi	66
2. Status Badan Hukum Partai Politik: Dilema Kepastian Hukum versus Instrumen Kontrol Politik	67
3. Pola Intervensi Pemerintah: Politisasi Waktu dan <i>Hostile Takeover</i> ...	68
4. Erosi Independensi Partai Politik: Dari Perwakilan Rakyat Menuju Kartel Negara	69
5. Problem Oligarki Internal: Simbiosis Mutualisme dengan Intervensi Eksternal	70
6. Disfungsi Representasi: Dari DPR Perwakilan Rakyat Menuju Perwakilan Parta.	71
7. Defisit Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik	72
8. Pendidikan Politik Internal yang Lemah dan Dampaknya terhadap Institusionalisasi Partai	73
9. Problem Utama: Paradoks Kelembagaan Partai Politik Indonesia	74
B. Prinsip-Prinsip Desain Kelembagaan Partai Politik yang Demokratis dan Mandiri Berdasarkan Teori dan Praktik Internasional	76

1. Kerangka Teoretis Institusionalisasi Partai Politik: Kriteria dan Dimensi	76
2. Prinsip-Prinsip Desain Kelembagaan Berdasarkan Praktik Internasional	77
a. Prinsip Otonomi dan Independensi Partai.....	77
b. Prinsip Demokrasi Internal (<i>Intra-Party Democracy</i>)	78
c. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan	80
d. Prinsip Pendidikan Politik Internal	82
e. Prinsip Pembatasan Kekuasaan dan Regenerasi Kepemimpinan ..	83
3. Pemisahan Rezim Badan Hukum dan Rezim Peserta Pemilu: Analisis Komparatif Jerman, Swedia, dan Inggris	84
a. Model Jerman: Integrasi Status Badan Hukum dengan Regulasi Pemilu	84
b. Model Swedia: Sistem Pendaftaran Sukarela dengan Otoritas Pemilu Independen.....	89
c. Model Inggris: Electoral Commission sebagai Regulator Independen	85
d. Sintesis Komparatif dan Implikasi untuk Indonesia.....	94
e. Prinsip-Prinsip Universal untuk Desain Kelembagaan yang Demokratis dan Mandiri.....	99
C. Perancangan Model Kelembagaan Partai Politik yang Ideal dan Konstitusional untuk Memperkuat Demokrasi dan Kemandirian Partai Politik di Indonesia	107
1. Titik Tolak Normatif dan Empiris: Paradoks Kelembagaan Partai Politik di Indonesia	107
2. Kerangka Teoretis Desain Kelembagaan: Institusionalisasi, Demokrasi Internal, dan Independensi.....	110
a. Institusionalisasi Partai: Otonomi, Systemness, dan Infusi Nilai	110
b. Demokrasi Internal dan Desain Organisasi Intra-Partai.....	110
c. Independensi dan Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu	111

3. Pelajaran Komparatif: Jerman, Swedia, Inggris dan Pemisahan Rezim Badan Hukum–Peserta Pemilu	114
a. Jerman: Integrasi Normatif, Otonomi Tinggi, dan Penyelesaian Yudisial.....	114
b. Swedia: Tidak Ada Kewajiban Badan Hukum, Rezim Peserta Pemilu Minimalis, dan Otoritas Pemilu Independen.....	114
c. Inggris: Asosiasi Tidak Berbadan Hukum, Electoral Commission Independen, dan Pendaftaran untuk Keperluan Pemilu	115
d. Posisi Indonesia dalam Spektrum Komparatif.....	115
4. Perancangan Model Ideal: Rekonstruksi Kelembagaan dalam Kerangka Konstitusional Indonesia	116
a. Pilar I – Reposisi Rezim Badan Hukum: Dari Instrumen Kontrol Eksekutif ke Mekanisme Legal-Formal Netral	116
b. Pilar II – Rezim Peserta Pemilu: KPU sebagai Single Entry Point yang Netral dan Independen	116
c. Pilar III – Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Dari Administrasi Politik ke Peradilan Netral	118
d. Pilar IV – Demokrasi Internal dan Anti-Oligarki: Rekayasa Kelembagaan Intra-Partai.....	119
e. Pilar V – Transparansi Keuangan dan Pendidikan Politik sebagai Basis Kemandirian	122
5. Sintesis Model Kelembagaan Ideal dan Konstitusional	123
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tokoh dan Konsep Kunci Independensi Partai Politik	45
Tabel 2. Nama Partai di Negara Jerman.....	85
Tabel 2. Perbandingan Model Regulasi Partai Politik: Jerman, Swedia, Inggris, dan Indonesia.....	89